

## PERAN KELOMPOK NELAYAN DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PESISIR DI LOMBOK

*Jurnal Analisa Sosiologi*

Januari 2023, 12 (1):1 -16

**Ratih Rahmawati<sup>1</sup>, Taufiq Ramdani<sup>2</sup>, Nuning Juniarsih<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*Coastal areas have potential, one of which is marine tourism, so efforts are needed to develop coastal areas into tourist attractions and productive economic businesses. However, there is a decrease in the number of human resources who are interested in becoming fishermen. Similarly, what happened on the Lombok Island, the quantity of human resources in stabilizing production in coastal area governance decreased, thus affecting the quality of coastal area development which affected the community's economy. Therefore, fishing groups play an important role in improving people's living standards. This research is a qualitative research using a case study approach analyzed by James Scott's theory of subsistence ethics. The component analyzed is the social situation in coastal communities located on the Lombok. The result of the study is that coastal communities improve living standards through the role of fishermen groups as follows the following fishermen's group activities that are beneficial for the development of the quality of marine products catches, carries out activities held by local governments and utilizes assistance distributed in groups, fishermen group members can carry out self-development by exchanging experiences and information between fellow fishermen, provide mutual assistance and support when in difficulties, on the other hand, have an awareness of the importance of education for their children so that they continue to strive to improve their lives.*

**Keywords:** *Fisherman Group, Potential Coastal Area, Standard Of Living, Coastal Community.*

### **Abstrak**

Wilayah pesisir memiliki potensi salah satunya adalah wisata bahari sehingga perlu upaya pengembangan daerah pesisir menjadi obyek wisata dan usaha ekonomi produktif. Namun, terdapat penurunan jumlah sumber daya manusia yang berminat untuk menjadi nelayan. Begitu pula yang terjadi di Pulau Lombok, kuantitas sumber daya manusia dalam stabilisasi produksi tata kelola wilayah pesisir menurun sehingga berpengaruh pula pada kualitas pengembangan wilayah pesisir yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kelompok nelayan berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus yang dianalisis dengan teori etika subsistensi James Scott. Komponen yang dianalisis adalah situasi sosial pada masyarakat pesisir yang berlokasi di Pulau Lombok. Hasil penelitian adalah masyarakat pesisir meningkatkan taraf hidup melalui peranan kelompok nelayan sebagai berikut: masyarakat

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mataram

<sup>1</sup>Email korespondensi: ratihrahma@unram.ac.id

peisir aktif mengikuti kegiatan kelompok nelayan yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas tangkapan hasil laut, melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah dan memanfaatkan bantuan yang disalurkan secara berkelompok, anggota kelompok nelayan dapat melakukan pengembangan diri dengan bertukar pengalaman dan informasi antar sesama nelayan, saling memberikan bantuan dan dukungan apabila berada dalam kesulitan, disisi lain memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan putra-putrinya sehingga terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup.

**Kata Kunci: Kelompok Nelayan, Potensi Wilayah Pesisir, Taraf Hidup, Masyarakat Pesisir.**

## **PENDAHULUAN**

Wilayah pesisir memiliki potensi salah satunya adalah wisata bahari sehingga perlu upaya pengembangan daerah pesisir menjadi obyek wisata dan usaha ekonomi produktif. Menurut Pujianiki dkk (2020), masyarakat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir untuk mengembangkan daerah pesisir sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perihal ini dilaksanakan supaya masyarakat mendapatkan penanganan kebijakan oleh pemerintah mengenai pengembangan dan pengelolaan sumberdaya pesisir, ekosistem dapat terjaga meskipun telah menjadi obyek wisata dengan peningkatan produktifitas masyarakat.

Pelibatan masyarakat atau pendekatan partisipatif dengan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya pesisir diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah (Sukuryadi, 2022). Masyarakat dapat lebih dominan dan berperan aktif dalam penentuan arah pengelolaan sumber daya pesisir sehingga dapat menganalisis kendala atau permasalahan dan menemukan potensi pada wilayah pesisir, disisi lain masyarakat mendapatkan dampak secara langsung dari pelaksanaan program pembangunan daerah di wilayah pesisir dengan dukungan dari pemerintah daerah.

Pelaksanaan program pemberdayaan pada kelompok nelayan merupakan aktivitas pelibatan masyarakat dengan memberikan penguatan dari segi kelembagaan untuk membentuk relasi sosial sesama nelayan dan meningkatkan kemampuan/pengetahuan (Prihatini dkk, 2022). Relasi sosial yang terjalin antar sesama nelayan dapat memberikan motivasi untuk

meningkatkan kemampuan dalam hal pemanfaatan sumber daya pesisir serta menemukan potensi di wilayah pesisir secara kolektif

Menurut Dewi dkk (2022) pelaksanaan kegiatan penguatan masyarakat pesisir melalui kelompok nelayan menjadi tidak optimal karena terdapat kendala seperti nelayan tidak memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan, minimnya jaringan seluler, serta kurangnya kontrol dari dinas terkait. Masyarakat pesisir kurang memahami pentingnya kelompok nelayan serta berorientasi pada bantuan yang diberikan oleh dinas terkait yang harus melalui kelompok bukan per individu. Selain itu, masyarakat di wilayah pesisir mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah, sebab kurangnya akses jaringan seluler. Harga hasil laut (ikan) tidak ditetapkan oleh Dinas Perikanan sehingga masyarakat pesisir (nelayan) mendapatkan harga jual yang tidak stabil di pasaran dan melakukan kegiatan produktif substitusi lainnya, selain itu Dinas Perikanan tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok nelayan

Apabila masyarakat pesisir dapat melaksanakan pengembangan wilayah pesisir melalui kegiatan kelembagaan kolektif maka masyarakat dapat menemukan potensi sumber daya pesisir. Menurut Safira (2020), program pengelolaan sumber daya pesisir serta pengembangan kawasan pesisir dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, khususnya pada hasil produksi perikanan dan pengembangan pariwisata (wisata bahari). Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat namun tidak mengeksploitasi sumber daya pesisir, masyarakat dapat memahami kondisi wilayah pesisir serta sumber dayanya, sehingga tidak menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan ekosistem wilayah pesisir.

Wilayah pesisir di Pulau Lombok memiliki potensi-potensi seperti sarana dan prasarana tempat pengembangan budidaya perikanan laut (Sekotong, Lombok Barat dan Gerupuk, Lombok Tengah), potensi budidaya laut unggulan (ikan bersirip (*finfish*), *abalone*, tiram mutiara, rumput laut, ikan hias (*clown fish*)) serta memiliki berbagai obyek wisata pantai seperti Pantai Kuta Mandalika, Pantai Selong Belanak, Pantai Sekotong, Pantai Ekas, dll (Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun

2020-2024;). Potensi yang dimiliki oleh Pulau Lombok perlu diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta program-program pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan sumberdaya pesisir dengan tepat guna dan berkelanjutan. Pulau Lombok mengalami penurunan jumlah sumber daya manusia yang berprofesi nelayan sehingga berpengaruh pada kualitas stabilisasi produksi tata kelola hasil laut. Berikut adalah jumlah nelayan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2019.

<b>Tahun</b>	015	016	017	018	019
<b>Jumlah Nelayan</b>	875	264	958	620	492

**Tabel 1. Data Jumlah Nelayan di Kabupaten Lombok Tengah 2015-2019**

Jumlah sumberdaya manusia yang berprofesi sebagai nelayan semakin menurun, pada tahun 2015 terdapat 9875 jiwa sedangkan pada tahun 2019 menjadi 8492 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang berminat untuk berpartisipasi pada bidang usaha sektor kelautan dan perikanan khususnya generasi muda (Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 Kabupaten Lombok Tengah)

Perihal tersebut salah satunya disebabkan munculnya kebijakan Permen-KP, yang berdampak menurunnya kesempatan kerja bagi nelayan (Husni dkk, 2021). Peraturan kebijakan pelarangan penangkapan bibit lobster berimbas pada berkurangnya minat untuk menjadi nelayan yang berpengaruh pada menurunnya tingkat perekonomian masyarakat. Perlu adanya pembinaan bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan usaha sektor kelautan dan perikanan tetapi tidak merugikan ekosistem laut, namun melakukan penangkapan hasil laut secara legal.

Nelayan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemasaran hasil laut akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rahmawati dkk, 2022). Perihal tersebut terjadi pada masyarakat Pulau

Lombok, penjualan hasil laut sebelum adanya kebijakan mencapai luar Pulau seperti Jawa dan Bali dengan omset yang tinggi namun setelah adanya kebijakan tersebut nelayan kesulitan dalam proses distribusi. Kebijakan PSBB menimbulkan penurunan tingkat kunjungan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata pantai di Pulau Lombok (Wulung dkk, 2020). Kebijakan ini memicu kerentanan terhadap taraf hidup masyarakat pesisir, meskipun pembangunan tetap berjalan namun wisatawan sebagai konsumen usaha sektor wisata berkurang.

Selain itu, menurut Sihombing dkk (2021), kerentanan taraf hidup masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan tradisional ditimbulkan oleh kemiskinan (akibat hasil tangkapan yang tidak menentu, kurang memadainya alat tangkap) serta jarak (akses) yang jauh dari kota. Artinya, terdapat permasalahan yang umumnya dirasakan oleh nelayan atau masyarakat pesisir. Perihal ini dapat disebabkan cuaca atau musim yang tidak mendukung, serta kepemilikan teknologi atau sarana prasarana oleh nelayan sehingga mempengaruhi jumlah hasil laut yang ditangkap atau diperoleh. Hal ini membuat pendapatan nelayan tradisional menjadi tidak menentu, bahkan kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Akses masyarakat untuk menuju kota yang terbilang jauh, dalam kondisi tertentu membuat masyarakat tidak memasarkan hasil tangkapan ke kota namun menunggu konsumen datang ke wilayah pesisir, selain itu akses yang jauh mempengaruhi kondisi pendidikan anak nelayan tradisional.

Teori etika subsistensi oleh James Scott menyatakan bahwa masyarakat “mengutamakan selamat” “menghindari resiko” serta “*safety first*” ketika menghadapi situasi sulit (Scott dalam Agung dan Gunawan, 2020). Masyarakat mengutamakan keselamatan keluarga meskipun tidak mendapatkan keuntungan, sehingga resiko-resiko dikurangi bahkan tidak ada sama sekali. Masyarakat hidup bersama dengan subsistensinya, sumber daya di wilayah pesisir digunakan untuk menghidupi keluarga dengan mempertahankan subsistensi dengan tanpa resiko.

Situasi krisis mendorong masyarakat pesisir untuk berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan subsistensinya dengan strategi khusus (Scott, 2019) seperti: 1) memanfaatkan relasi atau jaringan sosial, 2) penggunaan alternatif subsistensi, 3) mengikat sabuk

lebih kencang. Urgensi penggunaan teori etika subsistensi James Scott adalah peneliti dapat menganalisis peran kelompok nelayan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di Pulau Lombok.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan metode ini peneliti mengeksplorasi dan dapat memahami makna dalam masalah sosial atau fakta sosial pada masyarakat (Creswell, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga dapat memunculkan keunikan data serta data dapat diperoleh secara menyeluruh dan mendalam (Yin, 2019), peneliti telah menemukan fenomena yang belum banyak ditemukan disertai data yang unik, mendalam serta menyeluruh mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dalam masa krisis melalui peranan kelompok nelayan di Pulau Lombok sehingga dapat mengetahui apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi.

Lokasi penelitian ini di Pulau Lombok, peneliti memperoleh data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung serta wawancara mendalam kepada masyarakat pesisir/nelayan tradisional (*peasant fisher*) yang memiliki sifat subsisten, peralatan tangkap tradisional dan melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Selain itu, peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai sumber/referensi yang terkait peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir melalui kelompok nelayan. Teknik analisis data menggunakan metode inetraktif yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Wilayah pesisir memiliki potensi yaitu wisata bahari yang berwujud obyek wisata serta usaha ekonomi produktif. Terdapat sarana prasarana penangkapan ikan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan budidaya laut (rumput laut, kerapu, dll), obyek wisata pantai (Pantai Kuta Mandalika, Pantai Selong Belanak, dll), selain itu terdapat fasilitas wisata

pantai seperti kedai, foto dan videografi, *trip packet*, persewaan kapal, *snorkling*, *diving*, dll. Potensi tersebut perlu dilaksanakan pembangunan wilayah pesisir oleh pemerintah, swasta, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Utamanya adalah kontribusi atau peran dari masyarakat pesisir sebagai pihak yang mengetahui mengenai seluk beluk wilayah pesisir Pulau Lombok beserta persoalannya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah serta pengelolaan sumberdaya pesisir. Terjadi penurunan sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam usaha sektor kelautan dan perikanan di Pulau Lombok disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kebijakan Permen-KP No. 1 Tahun 2015 mengenai pelarangan penangkapan bibit lobster, sebab kegiatan ini merupakan kegiatan ilegal sehingga perlu dilaksanakan penyuluhan pengelolaan keberlanjutan hasil laut yang aman bagi ekosistem.

Kebijakan ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pendidikan karena pendapatan menurun drastis. Disamping itu terdapat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menurunkan minat masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, penurunan kunjungan oleh wisatawan, kemerosotan penjualan hasil laut, serta kesulitan dalam proses distribusi yang juga berdampak terhadap menurunnya taraf hidup masyarakat. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh SA yang merupakan ketua kelompok nelayan Desa Selong Belanak sebagai berikut:

“Sekarang pengunjung nya berkurang, wisatawan berkurang karena kena larang pemerintah yang pembatasan itu, ditambah sekarang ada PPKM. Jelas otomatis, penghasilan kita juga nilainya berkurang, yang kita harapkan kan dari pengunjung” (SA, 13 Agustus 2021).

Masyarakat melakukan upaya dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan taraf hidup dengan memperkecil resiko-resiko, seperti: menjual barang berharga dan memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa/BLT-DD). Perihal ini dinyatakan oleh informan LR sebagai berikut:

“Sering saya terima BLT, PKH ndak tentu memang kadang-kadang Rp.300.000, PKH kemarin itu dapatnya beras 45 kg, tiap bulan dapat juga Rp.600.000 per 1 orang, itu kan untuk anak-anak sekolah, habis untuk makan, mau investasi juga berat” (LR, 14 Agustus 2021).

Disamping itu, kelompok nelayan berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir di Pulau Lombok sebab masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan memperoleh manfaat seperti pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi nelayan (manajemen dan pengelolaan pariwisata). Selain itu, terdapat pendampingan atau monitoring oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Monitoring ini berbentuk pembinaan pada beberapa kelompok nelayan yang dilaksanakan secara bergantian supaya pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi nelayan khususnya yang terdampak kebijakan PERMEN-KP serta PSBB. Kelompok nelayan berperan sebagai fasilitator dalam proses penerimaan bantuan peralatan nelayan tangkap baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, manfaat ini disalurkan secara berkelompok tidak per individu. Perihal ini dinyatakan oleh informan YH sebagai berikut:

“Nah itu manfaatnya besar, soalnya sekarang kalau mau usulan bantuan itu tidak bisa individu. Kalau kelompok mau usulan bantuan bisa. Misalnya mau usul bantuan jaring dan semacamnya, kalau atas nama kelompok maka langsung di akomodir. Jadi sangat bermanfaat, ada kelompoknya sana ada banyak kelompok. 1 kelompok 5 orang sampai 10 orang. Jadi mereka dapat bantuan mesin, bantuan jaring, bantuan sampan, alat-alat tangkap itu. Ya, mereka itu saudara, sesama profesi nelayan, tetangga juga” (YH, 13 Agustus 2021).

Oleh karena itu, masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok dapat ikut andil dalam pengelolaan bantuan peralatan nelayan tangkap dari pemerintah sehingga dapat memperluas jangkauan wilayah tangkapan hasil laut serta menambah kualitas tangkapan.

Selain itu, kelompok nelayan berperan mendampingi masyarakat pesisir dalam proses pengajuan proposal bantuan dana/peralatan tangkap, diharapkan masyarakat pesisir memperoleh bantuan dana/peralatan tangkap yang sesuai seperti yang dibutuhkan. Kelompok nelayan produktif melaksanakan kegiatan pertemuan rutin mingguan/bulanan, masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok nelayan dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dengan sesamanya. Pengetahuan tersebut



mengenai teknik penangkapan ikan, area/wilayah yang terdapat hasil laut, serta perawatan kapal/mesin kapal, berikut penjelasan NT:

“Kita melaut untuk penangkapan, tapi bagaimana pemberdayaan dan pengolahan belum sampai sana. Meskipun kondisi seperti sekarang ini saya masih bisa tukar cerita dengan sesama nelayan, kan tetangga juga saudara-saudara sendiri, ada kesulitan-kesulitan, nanti kalau ada bisa saling bantu, kita juga bisa tukar pengalaman sama yang lebih muda-muda nelayan baru gimana caranya tangkap di titik yang banyak ikannya, gimana cara jaring yang bener, banyak lah mbak yang bisa dibagi, kalau ada yang kesulitan ekonomi juga bisa dibantu, dipinjami uang, kita juga bisa iuran bahan bakar kapal bersama” (NT, 13 Agustus 2021).

Solidaritas yang terdapat pada anggota kelompok nelayan membantu anggotanya yang berada dalam kesulitan ekonomi atau dalam kondisi sedang membutuhkan dana tambahan. Misalnya, terdapat anggota kelompok nelayan atau keluarganya yang sedang sakit maka seluruh anggota iuran untuk mengumpulkan dana. Apabila terdapat anak dari anggota kelompok yang hendak menikah maka memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang, begitupula sebaliknya.

Masyarakat pesisir juga berbagi kapal, hasil laut, dan iuran bahan bakar bersama anggota kelompok yang belum/tidak memiliki kapal untuk melaut. Solidaritas yang erat antar anggota kelompok nelayan terjadi akibat jalinan/jaringan sosial pada masing-masing kelompok sehingga dapat bersama-sama saling bekerjasama untuk keluar dari kesulitan ekonomi akibat munculnya kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat pesisir, meskipun pendapatan/penghasilan tidak sama seperti kondisi sebelumnya.

Masyarakat pesisir memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan putra-putrinya, hal ini membuat masyarakat pesisir tidak berhenti berupaya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Perihal ini ditunjukkan dengan terdapat anak-anak masyarakat pesisir yang menempuh pendidikan umum, pondok pesantren, universitas bahkan hingga jenjang Strata-2. LR menyatakan bahwa:

“Saya ini tetap bekerja buka restoran saya ini karena ya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, anak juga masih ada yang kuliah,

mau lanjut S-2 jadinya ya saya harus bertahan begini mbak, kalau aktif di kelompok sadar wisata itu ya demi kebaikan kita sendiri, selain bisa silaturahmi sama anggota lain juga saya dapat banyak informasi, pengetahuan saya bertambah kalau ikut pelatihan-pelatihan dari dinas, saya juga dapat bantuan dari dinas kalau untuk kita yg aktif di kelompok, jadi ndak ada ruginya kita aktif di kelompok ini (LR, 14 Agustus 2021).

Oleh karena itu, masyarakat pesisir/nelayan sebagai orangtua terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan dasar khususnya untuk pendidikan putra/putrinya. Dalam kondisi terdampak kebijakan PERMEN-KP serta PSBB, masyarakat pesisir yang memiliki keinginan untuk mempertahankan taraf hidupnya rata-rata individu yang sudah menikah dan memiliki tanggungjawab terhadap keluarga (istri dan anak) sehingga memiliki prioritas untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya.

**Gambar 1. Masyarakat Pesisir Saling Bekerjasama dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi Penangkapan Hasil Laut.**



Peran kelompok nelayan penting bagi kemajuan serta kelestarian wilayah pesisir terutama obyek wisata pantai yang kerap dikunjungi oleh wisatawan. Sebab, masyarakat pesisir yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) mengenal kondisi wilayah pesisir Pulau Lombok yang dijadikan obyek wisata pantai sehingga selalu berupaya untuk menjaga kondisi lingkungan serta ekosistem pesisir supaya tertata dan lestari. Hal ini sebagai wujud kepedulian masyarakat pesisir terhadap kualitas wilayah pesisir di Pulau Lombok, sehingga kelestarian ekosistem (obyek wisata pantai, padang lamun, mangrove, terumbu karang) tetap terjaga dan

bermanfaat bagi masyarakat pesisir generasi sekarang serta bagi generasi yang akan datang.

### **Pembahasan**

Prinsip *safety first* yang diterapkan adalah dengan menjual hasil laut di wilayah sekitar tempat tinggal, nelayan tidak mau mengambil resiko melanggar kebijakan sebab berkaitan dengan hukum. Disamping itu, nelayan tidak mengolah hasil laut menjadi produk baru karena tidak memiliki pengalaman, selain itu sasaran pasar/konsumen terbilang sedikit sebab dalam masa pandemi Covid-19. Meskipun penghasilan tidak setinggi kondisi sebelumnya, masyarakat masih tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar serta melakukan tindakan subsistensi untuk menopang perekonomian keluarganya (Nora, 2018). Dalam kondisi minimal, masyarakat pesisir dapat bertahan hidup dengan menerapkan tindakan mekanisme survival (Scott, 2019).

Masyarakat pesisir Pulau Lombok menjual barang berharga seperti barang elektronik, perhiasan, dan kendaraan bermotor; serta memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/BLT-DD), dana dari penjualan barang berharga dan dana BLT-DD digunakan untuk prioritas utama masyarakat pesisir yaitu biaya pendidikan putra-putrinya, tidak digunakan untuk modal usaha. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Strategi khusus yang diterapkan oleh masyarakat pesisir dalam menghadapi kondisi kesulitan perekonomian akibat munculnya kebijakan PERMEN-KP dan PSBB dengan menerapkan metode survival mechanism pendekatan etika subsistensi, cara ini dibedakan menjadi tiga tindakan. *Pertama*, Memanfaatkan relasi atau jaringan sosial, hal ini dapat berbentuk formal maupun informal, sehingga masyarakat yang dihimpunkan dalam suatu kelompok sosial dapat tetap bertahan hidup di kondisi yang sulit karena menggunakan hubungan kekerabatan yang dimiliki (Fajri dkk, 2021). Masyarakat pesisir melaksanakan kegiatan kolektif dengan sesama nelayan. Dalam hal ini kelompok nelayan memiliki peran penting dalam

pelaksanaan kegiatan nelayan/masyarakat pesisir, sebab sebagai fasilitator sekaligus menjadi perantara antara nelayan dengan pemerintah daerah/pusat.

Perihal ini ditunjukkan dengan penerimaan bantuan peralatan nelayan tangkap pendampingan pengajuan proposal bantuan dana/peralatan tangkap, dan pertemuan rutin mingguan/bulanan yang dilakukan secara kelompok bukan per individu. Solidaritas pada jaringan sosial masyarakat pesisir membantu anggotanya untuk mempertahankan taraf hidup dalam kondisi sulit akibat munculnya kebijakan PERMEN-KP dan PSBB. Mekanisme yang terjadi dalam kelompok nelayan/KUB adalah antara nelayan dengan nelayan, nelayan dengan pemerintah desa, nelayan dengan pemerintah daerah/pusat.

Menurut Sofian dkk (2021), masyarakat memperoleh bantuan dari relasi/jaringan sosial sehingga dapat memanfaatkan relasi yang terjalin antara patron dengan klien, hal ini sebagai wujud asuransi anggota/masyarakat/klien terhadap pemerintah desa/daerah/pusat/patron

*Kedua*, Penggunaan alternatif subsistensi, yaitu dengan melakukan kegiatan swadaya, atau melakukan kegiatan lain dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan tidak menimbulkan resiko (Scott, 2019). Dalam hal ini, nelayan yang sedang mengalami kondisi sulit seperti hambatan cuaca buruk, terdapat kebijakan pelarangan penangkapan bibit lobster serta kebijakan PSBB melakukan subsistensi dengan menjual hasil laut (ikan, udang, dll) di wilayah sekitar tempat tinggal, pengepul dan pasar tradisional. Nelayan Pulau Lombok tidak melakukan kegiatan lain seperti pengolahan hasil laut atau menginovasi produk olahan hasil tangkapannya sebab belum memiliki pengalaman pada bidang tersebut, selain itu memerlukan modal usaha serta sasaran pasar/konsumen terbilang sedikit karena dalam masa pandemi.

Nelayan tidak melakukan ekspor bibit lobster karena tidak ingin mengambil resiko melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kata lain tidak ingin melanggar hukum. Oleh karena itu, nelayan bertahan dengan subsistensinya dengan menjual barang berharga, berhutang,

memanfaatkan BLT-DD serta berjualan hasil laut di sekitar tempat tinggal untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam kondisi saat ini, nelayan Pulau Lombok tidak lagi nelayan komersil (commercial fishers) yang melakukan pemasaran pada pasar domestik dan ekspor, namun menjadi nelayan asli (indigenous fishers) yaitu nelayan yang menangkap ikan selain untuk konsumsi sendiri juga memasarkan ikan secara skala kecil (Satria, 2015)

*Ketiga*, Mengikat sabuk lebih kencang, masyarakat meminimalisir pengeluaran supaya tetap dapat bertahan hidup, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki utamanya untuk mencukupi kebutuhan pangan, menekan pengeluaran dengan cara berhemat, dan mengurangi mutu dan frekuensi pangan dengan mengganti lauk pauk hasil pertanian dan bahari di sekitar (Scott, 2019).

Dalam hal ini masyarakat pesisir Pulau Lombok mengurangi pengeluaran yang diperoleh dari pendapatan penjualan ikan dan BLT-DD, dana tersebut utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sisanya untuk pendidikan anak-anak. Untuk makanan sehari-hari, masyarakat pesisir tidak terlalu memikirkan secara berlebihan, nelayan dapat memanfaatkan sumber daya disekitarnya seperti ikan hasil tangkapan sendiri, sayur yang ditanam disekitar tempat tinggal serta mengganti daging sapi dan ayam dengan telur sehingga lebih ekonomis serta terjangkau.

Masyarakat pesisir melakukan penghematan dengan cara mengurangi intensitas pembelian barang-barang yang dijual oleh pedagang kelontong keliling yang setiap minggunya memasuki wilayah pesisir pantai, yang menjual barang-barang seperti ember, gayung, baju, perkakas, peralatan rumah tangga. Meskipun diperbolehkan berhutang, namun masyarakat tidak melakukannya sebab pengeluaran utama ditujukan untuk kebutuhan pangan. Sesuai dengan pernyataan Indahsari dan Hidayat (2021), masyarakat memiliki kebutuhan yang diutamakan/diprioritaskan, dengan kata lain mengencangkan sabuk lebih kencang dengan cara menyederhanakan menu makanan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan oleh

masyarakat pesisir supaya tetap dapat memenuhi kebutuhan serta dapat berhemat.

Strategi yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir Pulau Lombok dapat meminimalisir resiko dalam pemenuhan kebutuhan, tindakan seperti diatas dilakukan supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Disamping dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan juga dapat memenuhi biaya untuk pendidikan anak-anaknya dalam kondisi terdampak kebijakan PERMEN-KP dan PSBB.

## **KESIMPULAN**

Penurunan sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam usaha sektor kelautan dan perikanan di Pulau Lombok disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kebijakan Permen-KP No. 1 Tahun 2015 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kelompok nelayan berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir di Pulau Lombok sebab masyarakat yang tergabung dalam kelompok nelayan memperoleh manfaat seperti pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi nelayan (manajemen dan pengelolaan pariwisata), pendampingan atau monitoring oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dan fasilitator dalam proses penerimaan bantuan peralatan nelayan tangkap. Metode survival mechanism pendekatan etika subsistensi. 1) Memanfaatkan relasi atau jaringan sosial dengan melaksanakan kegiatan kolektif dengan sesama nelayan. 2) Penggunaan alternatif subsistensi dengan menjual barang berharga, berhutang, memanfaatkan BLT-DD serta berjualan hasil laut di sekitar tempat tinggal untuk kebutuhan sehari-hari. 3) Mengikat sabuk lebih kencang, masyarakat pesisir Pulau Lombok mengurangi pengeluaran yang diperoleh dari pendapatan penjualan ikan dan BLT-DD, dana tersebut utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sisanya untuk pendidikan anak-anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, Dhika Kurniawan dan Gunawan. 2020. KEMRUNGSUNG: Intensifikasi Pertanian oleh Petani di Desa Kenalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. *SOLIDARITY* 9(2).
- Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. 2020. RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Press: Lombok.
- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Mutiar Fitri dan Dadiara, Frans Simon. 2022. Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)* 7(1).
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2019. PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019. Dinas Kelautan Dan Perikanan : Kabupaten Lombok Tengah.
- Fajri, Anisa Nur; Rachman, Bustami; dan Zulkarnain, Iskandar. 2021. STRATEGI BERTAHAN HIDUP PETANI (Studi pada Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji pada Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Studi Inovasi* 1(3).
- Husni, Syarif; Yusuf, M; Nursan, Muhammad; Utama FR, Aeko Fria. 2021. KERUGIAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN KECIL PASCA KEBIJAKAN LARANGAN PENANGKAPAN BIBIT LOBSTER (Studi Kasus di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur). *Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram* 3(1).
- Indahsari, Amalia Nur dan Hidayat, Nurul. 2021. Strategi Masyarakat Petani Tadah Hujan Desa Gayam dalam Menghadapi Kerentanan Ekologi Kekeringan. *JURNAL ENTITAS SOSIOLOGI* 10(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. *Qualitative Data Analysis (Fourth Edition)*. New York: SAGE Publication. Ltd.
- Nora, Vivi Yulia. 2018. MORAL EKONOMI PETANI MISKIN DI JORONG TABEK NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies* 2(1).
- Prihatini, Juliati; Elungan, Preisy Celin; dan Rifai, M. 2022. PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN MELALUI PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI DESA DALUM KECAMATAN SALIBABU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi Kelompok Nelayan Pada Koperasi Teluk Lawasan Indah). *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)* 7(1).

- Pujianiki, Ni Nyoman; Dirgayusa, I Gusti Ngurah Putra; dan Januatmika, I Made Rai. 2020. Pengelolaan Wilayah Pesisir di Pantai Pandawa. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 24(1).
- Rahmawati, Ratih; Ramdani, Taufiq; Juniarsih, Nuning. 2021. STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT PESISIR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LOMBOK TENGAH. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(6).
- Safira, Evi. 2020. Pengembangan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan di Ulele Kota Madya Banda Aceh. *Serambi Konstruktivis* 2(2).
- Satria A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott, James C. 2019. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Sihombing, Saskia Juliani; Kusai; dan Warningsih, Trisla. 2021. STATUS ASET PENGHIDUPAN NELAYAN DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *J. Sosek KP* 16(1).
- Sofian, Akhriyadi; Yanti, Nur; dan Illiyyun, Naili Ni'matul. 2021. DINAMIKA KEHIDUPAN EKONOMI PETANI GARAM DI DESA DRESI KULON. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10(3).
- Sukuryadi; Johari, Harry Irawan; Ibrahim; Adiansyah, Joni Safaat; Nurhayati; Rochayati, Nurin; Mas'ad; Herianto, Agus; Khosiah; Mayasari, Deviana. 2022. Penyusunan Perencanaan Pesisir Berbasis Isu Wilayah di Desa Lembar Lombok Barat. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6(3).
- Wulung, Shandra Rama Panji; Puspasari, Aisha Hanun; dkk. 2020. Destinasi Super Prioritas Mandalika dan Covid-19. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 11(2).
- Yin, Robert K. 2019. *Studi Kasus, Desain, dan Metode*. Jakarta: PT Grafindo Persada.